



Media: Radar

Hari: Jumat

Tanggal: 18 April 2025

Halaman: 1

Hasto Minta Penarikan Iuran Kedepankan Gotong Royong

BERJALANNYA kebijakan baru pengelolaan sampah melalui sistem penjemputan dengan penggerobak menjadi sorotan legislatif. Pasalnya, tidak sedikit masyarakat miskin yang keberatan dengan kewajiban pembayaran kepada penggerobak.

Anggota DPRD Kota Jogja Solihul Hadi mengatakan, pembayaran kepada penggerobak memang menjadi beban terutama bagi sebagian masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab mereka harus mengeluarkan biaya tambahan di tengah mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Dia juga kerap mendapatkan laporan dari masyarakat miskin tentang keberatan biaya penggerobak tersebut. Apalagi sebelumnya mereka bisa membuang sendiri ke depo tanpa harus mengeluarkan biaya.

Oleh karena itu, legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun mendorong agar Pemkot bisa memberi keringanan. Bahkan jika perlu mengalokasikan anggaran untuk subsidi atau membebaskan biaya penggerobak bagi masyarakat miskin.

"Jika memang memungkinkan, pembebasan biaya penggerobak harus diterapkan. Agar tidak menambah beban masyarakat miskin," ujar Solihul saat ditemui, kemarin (17/4).

Jika memang kebijakan tersebut dapat direalisasikan, Solihul berharap, ada pengawasan ketat. Misalnya, pengurus kampung dapat memberikan standarisasi siapa saja masyarakat miskin yang layak dibebaskan biaya retribusi penggerobak.

Kemudian agar kebijakan penjemputan

“
Jika memang memungkinkan, pembebasan biaya penggerobak harus diterapkan. Agar tidak menambah beban masyarakat miskin,”

SOLIHUL HADI
Anggota DPRD Kota Jogja

sampah dapat berlaku adil. Dia juga meminta agar ada klasifikasi khusus terhadap sampah yang dihasilkan oleh masing-masing masyarakat. "Agar tidak terjadi kecemburuan sosial," terangnya.

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menyampaikan, kebijakan retribusi penggerobak merupakan kewenangan masing-masing wilayah atau RW. Artinya, besaran retribusi ditentukan dari kesepakatan warga.

Hasto pun berharap, agar dalam penarikan iuran kepada penggerobak itu bisa mengedepankan gotong royong. Misalnya, jika ada sisa iuran dari masyarakat bisa digunakan untuk mensubsidi masyarakat yang masuk kategori miskin. "Dengan demikian, warga yang termasuk dalam kategori miskin tidak terbebani dengan iuran sampah," katanya belum lama ini. (inu/wia/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005